

**ANALISIS HUBUNGAN DEFISIT KESEIMBANGAN PRIMER TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**
***ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF THE PRIMARY BALANCE DEFICIT
TO ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA***

Nadia Esa Putri¹, Muhammad Fachril Husain Jeddawi², Fadilah Risqy Utami³

¹Pegawai Perum Perumnas Jakarta;

²Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI;

³Staf of Ernst & Young, berdomisili di Tokyo.

Email: nadiaesaputri22@gmail.com

ABSTRAK

APBN dikatakan sehat ketika memiliki defisit anggaran yang semakin rendah bahkan menuju surplus dan keseimbangan primer positif. Dari tahun 2010 APBN Indonesia menunjukkan defisit anggaran dan keseimbangan primer juga menunjukkan tren negative sejak tahun 2012. Dalam hal keseimbangan primer dan APBN yang mengalami defisit, dapat diindikasikan bahwa belanja suatu negara melebihi penerimaannya. Belanja yang dikeluarkan pemerintah ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan PDB. Teori Keynes beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat hubungan antara defisit keseimbangan primer terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara mengalami defisit keseimbangan primer maka dipastikan belanja negara akan lebih besar dari pendapatan negara. Hal ini berarti pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan dan stimulus ke beberapa sektor dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menekan angka pengangguran, meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Selain kebijakan fiskal terdapat kebijakan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan PDB melalui berbagai macam instrument moneternya seperti operasi pasar terbuka dan *standing facilities*. Defisit keseimbangan primer tidak menjadi hal yang baik karena terdapat utang bunga yang harus dibayarkan dan nominal utang bunga setiap tahunnya mengalami kenaikan apabila anggaran defisit. Dalam upaya menekan defisit keseimbangan primer, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan, diantaranya memaksimalkan potensi pendapatan negara dan belanja negara, penghematan biaya operasional, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, penegakan pada keamanan dan ketertiban serta hukum yang berlaku untuk mengembalikan kepercayaan investor

Kata kunci: APBN, Keseimbangan Primer, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The state budget is said to be healthy when it has a lower budget deficit even towards a surplus and positive primary balance. From 2010 the Indonesian State Budget shows a budget deficit and the primary balance has also shown a negative trend since 2012. In the case of the primary balance and the State Budget experiencing a deficit, it can be indicated that a country's spending exceeds its revenue. This expenditure issued by the government is closely related to economic growth, where the economic growth of a country can be measured by GDP. Keynes theory assumes that government intervention in the economy determines economic development can run optimally. Based on the theory as well as previous research, it is known that there is a relationship between the primary balance deficit on economic growth. If a country experiences a primary balance deficit, it is certain

that state spending will be greater than state revenue. This means that the government is intensively carrying out development and stimulus to several sectors in the context of economic growth. It is hoped that the increased economic growth will reduce unemployment, increase the competitiveness of domestic products and attract investors to invest their capital. In addition to fiscal policy, there is monetary policy adopted by Bank Indonesia in an effort to increase GDP through various monetary instruments, such as open market operations and standing facilities. The primary balance deficit is not a good thing because there is interest debt that must be paid and the nominal interest debt increases every year if the budget is in deficit. In an effort to reduce the primary balance deficit, there are several steps that can be applied, including maximizing the potential of state revenue and state expenditures, saving operational costs, strict supervision of budget use, enforcement of security and order and applicable laws to restore investor confidence.

Keywords: APBN, Primary Equilibrium, Economic Growth

PENDAHULUAN

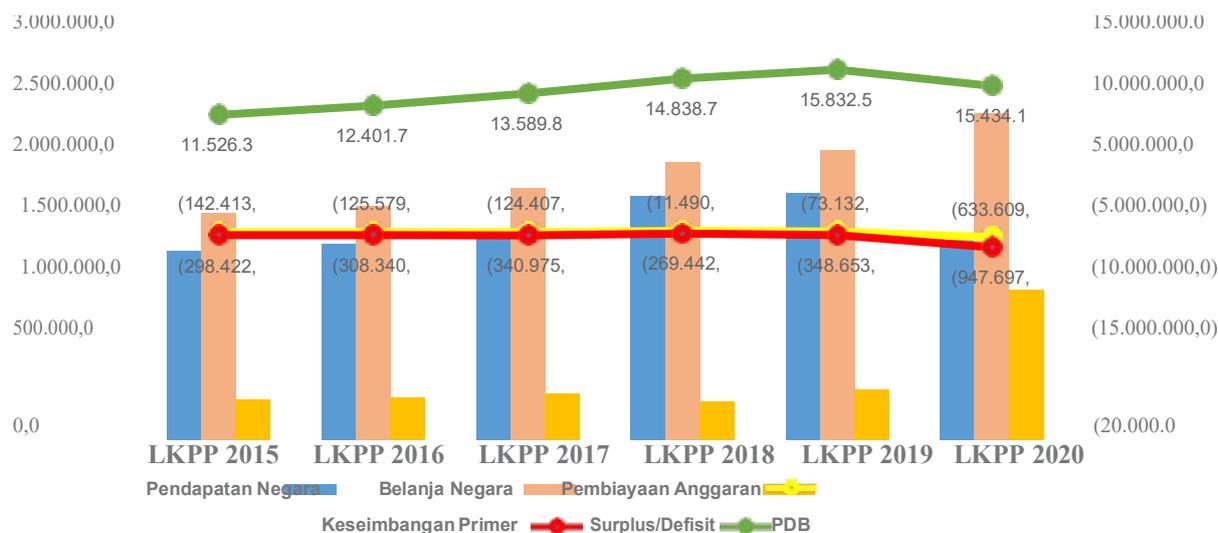
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran tahunan. Perencanaan pembangunan sendiri telah diatur dalam suatu konsensus nasional melalui mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur antara lain dalam Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Kemenkeu.go.id). Terdapat dua tujuan utama dibentuknya APBN, yaitu (accurate.id):

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Aktivitas tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat.

APBN dikatakan sehat ketika memiliki defisit yang semakin rendah bahkan menuju surplus dan keseimbangan primer menuju positif. Dari tahun 2010, APBN Indonesia menunjukkan defisit anggaran yang berarti belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Sejalan dengan defisit anggaran, keseimbangan primer juga menunjukkan tren negatif sejak tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara diluar dari pembayaran bunga utang.

REALISASI APBN (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT) 2015 – 2020



Sumber : Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 1. Realisasi APBN (LKPP) 2015 – 2020

Dari Gambar 1, dapat diketahui bahwa belanja negara selalu lebih besar dari pendapatan negara sehingga menyebabkan defisit di setiap tahunnya. Dalam menutupi defisit tersebut, pemerintah menggunakan pembiayaan yang berakibat pembiayaan dari 2015–2020 juga meningkat dan berdampak ke keseimbangan primer Indonesia yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Sejalan dengan hal tersebut, PDB dari 2015–2019 mengalami kenaikan yang berarti pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami kenaikan. Akan tetapi pada 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dan diikuti dengan meningkatnya defisit keseimbangan primer dan defisit realisasi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya Pandemic Covid-19 yang menyebabkan penerimaan negara menurun dan membengkaknya belanja negara. Dengan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisis mengenai Hubungan Antara Defisit Keseimbangan primer terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

TEORI DAN PEMBAHASAN

Anggaran pemerintah yang biasa disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pencatatan selisih

antara penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dengan pengeluaran pemerintah. APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Pada sisi pengeluaran, terdapat tiga pos utama, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai dan pengeluaran pemerintah untuk transfer payment yang meliputi; misalnya, pembayaran subsidi / bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah terhadap masyarakat. Sisi penerimaan menunjukkan darimana dana tersebut diperoleh, yaitu pajak (berbagai macam), pinjaman bank sentral, pinjaman dari masyarakat dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. (Boediono, 1980 dalam Perdana dan sugiyanto, 2021).

Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam merancang APBN nya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam hal APBN defisit maka akan menggunakan pembiayaan dalam ataupun luar negeri untuk menutupi defisit tersebut. Di Indonesia, defisit anggaran telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 yaitu tidak melebihi 3 % dari Produk Domestik

Bruto (PDB). Akan tetapi di masa Pandemic sekarang ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2020 dan Perpres 72 Tahun 2020 yang mentolerir defisit sampai dengan 5,07% dan 6,14% dari PDB.

Hyman (2005) dalam Husriah (2020) mendefinisikan defisit anggaran pemerintah adalah kelebihan pengeluaran pemerintah dari penerimaan pemerintah yang berupa pajak, fee, dan pungutan retribusi yang diperoleh pemerintah. Besarnya defisit ditentukan dalam persentase terhadap PDB pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan menggunakan cara tersebut dapat diperoleh gambaran beban utang yang dimiliki pemerintah terhadap pendapatan nasional.

Dalam kaitannya dengan keseimbangan primer, anggaran suatu negara dapat mengalami defisit tapi keseimbangan primernya surplus. Hal ini terjadi karena pada perhitungan keseimbangan primer, pembayaran utang bunga dikeluarkan sehingga apabila nominal pembayaran utang bunga besar akan berdampak defisitnya suatu anggaran. Selain itu defisitnya suatu anggaran jika pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran / belanja. Sebaliknya jika keseimbangan primer negatif maka anggaran tersebut sudah dipastikan akan mengalami defisit.

Keseimbangan Primer Surplus – APBN bisa Surplus atau Defisit
Keseimbangan Primer Defisit – APBN Defisit

Dalam hal keseimbangan primer dan APBN defisit, dapat diindikasikan bahwa belanja suatu negara melebihi penerimaan negara. Belanja yang dikeluarkan pemerintah ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Samuelson (2002) dalam Husriah (2020), PDB adalah jumlah *output* total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam satu tahun dan mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah suatu

negara tanpa membedakan kewarganegaraan pada suatu periode waktu tertentu.

Kebijakan pengeluaran / belanja negara ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi - fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal, salah satunya melalui kebijakan pengeluaran atau belanja negara. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang / jasa pemerintah

Pengeluaran/belanja negara memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir sebagian besar belanja negara yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang / jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja negara pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal/ investasi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan – kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar)

maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja negara) (Sukirno, 2006 dalam Azwar, 2016).

Oleh karena itu, menurut Mangkoe-soebroto (2002) dalam Azwar (2016), di negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. Peranan alokasi. Sumber daya yang dimiliki pada dasarnya dapat digunakan untuk menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan barang publik (*public goods*). Barang swasta (*private goods*) adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Namun tidak semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini dinamakan barang publik (*public goods*) sehingga perlu dialokasikan oleh negara, seperti contohnya prasarana jalan, pertahanan, pembersihan udara dan sebagainya, yang pengadaannya perlu peran negara (pemerintah) di dalamnya;
- b. Peranan distribusi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pajak progresif yaitu beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, yang disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin. Melalui subsidi, pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran misalnya dengan memberikan kredit perumahan murah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk untuk petani
- c. Peranan stabilitas. Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peran utama sebagai stabilator perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah

yang berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat. Misalnya dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/ jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/ jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) misalnya, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat belanja negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat *employment* menuju *full employment*. Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Teori Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan PDB ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan PDB, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Konsep perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa:

$$\text{PDB (Y)} = \text{Konsumsi (C)} + \text{Investasi (I)} + \text{Pengeluaran Pemerintah (G)} + [\text{Ekspor (X)} - \text{Impor (M)}]$$

Persamaan tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan PDB. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur yang menyatakan permintaan agregat. Dengan membandingkan nilai G (Pengeluaran Pemerintah) terhadap Y (PDB) serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan PDB. Selain itu indikator lainnya seperti Konsumsi, Investasi dan net ekspor juga memiliki andil dalam pembentukan PDB.

Teori Keynesian ini sejalan dengan penelitian Azwar (2016) yang menyatakan bahwa kenaikan nilai realisasi pengadaan barang/ jasapemerintah (belanja negara) pada bulan berjalan akan segera terlihat dampaknya dengan naiknya pertumbuhan ekonomi pada bulan tersebut. Alfirman dan Sutriyono (2006) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan PDB. Pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif. Sementara pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Manalu (2004) juga mengkaji tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa perubahan pada pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi.

Dikutip dari Kompas.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II 2021. Hasilnya, Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 7,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*Year-on-Year / YoY*). Pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari kebijakan fiskal pemerintah diantaranya *Refocusing* anggaran dilakukan pemerintah untuk membiayai berbagai belanja di Kementerian Lembaga (K/L) terkait penanganan Covid - 19, baik untuk vaksinasi, *testing, tracing*, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga

kesehatan. *Refocusing* anggaran dilakukan dengan memangkas anggaran – anggaran seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini.

Selanjutnya ada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan output dari *refocusing* anggaran yang dibuat dalam rangka menjaga konsumsi masyarakat, mendorong investasi dan mendukung aktivitas ekspor dan impor. Dalam menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah melalui Program PEN melakukan percepatan dan Penguatan Subsidi dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik dan penambahan penyaluran program keluarga harapan. Selain itu, pemerintah juga fokus terhadap perluasan stimulus konsumsi dengan fokus pada masyarakat kelas menengah seperti stimulus dalam pariwisata, restoran dan transportasi

Di sektor investasi, pemerintah melalui Program PEN memberi beberapa stimulus diantaranya insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai, memberi kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan / pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM. Dalam mendukung ekspor dan impor, pemerintah melalui Program PEN memberi beberapa stimulus diantaranya insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (Lartas) ekspor impor, percepatan proses ekspor dan impor untuk *Reputable Traders*, peningkatan dan percepatan layanan ekspor dan impor juga pengawasan melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).. Program PEN juga disalurkan memberi beberapa stimulus untuk dunia usaha diantaranya:

- UMKM: Subsidi Bunga, Insentif Perpajakan, Penjaminan Untuk Kredit Modal Kerja Baru UMKM

- BUMN: Penyertaan Modal Negara (PMN), Pembayaran Kompensasi, Tala-ngan (Investasi) Modal Kerja, Dukungan dalam bentuk lain seperti Optimalisasi BMN, Pelunasan Tagihan, *Loss Limit* Penjaminan, Penundaan Dividen, Pen-jaminan Pemerintah, Pembayaran Tala-ngan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Korporasi: Insentif Perpajakan Du-nia Usaha dan Penempatan dana Pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi Pandemic Covid - 19, kebijakan fiskal (pengeluaran / belanja negara) menjadi *backbone* dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini terbukti dengan beberapa program yang dicanangkan untuk menstimulus Konsumsi Masyarakat (C), Mendorong Investasi (I) dan Mendukung Ekspor dan Impor (X-M). Sejalan dengan hal tersebut teori keyenesian dalam konteks ini terbukti dimana kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah (G) dapat menaikkan atau menurunkan PDB (Y).

Dalam hubungannya dengan defisit keseimbangan primer, dapat disimpulkan bahwa jika suatu negara mengalami defisit keseimbangan primer maka dipastikan belanja negara akan lebih besar dari pendapatan negara. Hal ini berarti pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan dan stimulus ke beberapa sektor dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menekan angka pengangguran, meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menarik investor untuk menanamkan modalnya

KESIMPULAN

Dari uraian diatas berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara defisit keseimbangan primer terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara mengalami defisit keseimbangan primer maka dipastikan belanja negara akan

lebih besar dari pendapatan negara. Hal ini berarti pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan dan stimulus ke beberapa sektor dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menekan angka pengangguran, meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Selain kebijakan fiskal terdapat kebijakan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI) dalam upaya meningkatkan PDB melalui berbagai macam instrument moneternya seperti operasi pasar terbuka dan *standing facilities*.

Defisit keseimbangan primer tidak menjadi hal yang baik bagi kondisi keuangan negara karena terdapat utang bunga yang harus dibayarkan dan nominal utang bunga setiap tahunnya mengalami kenaikan apabila anggaran defisit. Dalam upaya membuat keseimbangan primer menjadi positif, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan, di antaranya

- a. Memaksimalkan potensi pendapatan negara dari berbagai lini dan belanja negara kedepannya, hal ini berdasarkan realisasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015 – 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa realisasi pendapatan dan belanja yang belum maksimal (lampiran 1)
- b. Melakukan penghematan biaya operasional dan lini lainnya yang dirasa kurang efektif dan efisien
- c. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran agar tidak disalahgunakan atau dikorupsi
- d. Penegakan pada keamanan dan ketertiban serta hukum yang berlaku untuk mengembalikan kepercayaan investor

DAFTAR PUSTAKA

Alfirman dan Sutriyono. (2006). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression.

- Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1, 2006
- Azwar, (2016), Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia, Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 20 No. 2 (Agustus 2016)
- Husriah, (2020), Pengaruh Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Economix Volume 8 Nomor 2 Desember 2020
- Manalu, Maria Christina. (2004). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. USU Institutional Repository
- Perdana, Mayang Novi Annisa dan FX. Sugiyanto, 2021. Analisis Fenomena Defisit Anggaran dan Defisit Transaksi Berjalan Di Indonesia (1990-2019). Diponegoro Journal Of Economics. Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
- <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>, diakses pada 3 Agustus 2021 Pukul 10.05
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2021 Pukul 12.00
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-apbn-dan-apbd/>, diakses pada 3 Agustus 2021 Pukul 10.35

Lampiran 1

	2015			2016			2017			2018		
	APBN	LKPP	Realisasi									
Pendapatan Negara	1.793.588,9	1.508.020,5	84%	1.822.545,8	1.555.934,1	85%	1.750.283,4	1.666.375,9	95%	1.894.720,3	1.943.674,9	103%
Penerimaan Perpajakan	1.373.391,6	1.240.419,0	90%	1.546.664,6	1.284.370,1	83%	1.498.871,6	1.343.523,8	90%	1.618.095,5	1.518.783,8	94%
Penerimaan Bukan Pajak	410.341,0	255.628,5	62%	273.849,4	261.976,3	96%	250.039,1	311.216,3	124%	275.428,0	409.320,2	149%
Hibah	3.256,3	11.973,0	366%	2.031,8	8.387,7	442%	1.372,7	11.623,8	847%	1.196,9	15.564,9	1300%
Belanja Negara	2.039.483,6	1.806.443,3	89%	2.095.724,7	1.864.275,0	89%	2.080.451,2	2.007.351,8	96%	2.220.657,0	2.213.117,8	100%
Belanja Pemerintah Pusat	1.332.442,3	1.183.303,7	89%	1.325.551,4	1.154.078,1	87%	1.375.526,1	1.265.353,4	92%	1.454.434,4	1.455.324,9	100%
Transfer Ke Daerah dan Da	647.041,3	623.139,6	96%	770.173,4	710.256,9	92%	764.925,1	741.992,4	97%	766.162,6	757.792,9	99%
Utang Bunga	761.988,3	766.039,8	101%	784.340,6	782.767,3	99%	227.734,6	276.588,0	121%	238.607,1	257.952,0	108%
Belanja diluar Utang	1.887.515,3	1.650.433,5	87%	1.910.784,1	1.681.513,7	88%	1.859.256,6	1.730.783,8	93%	1.982.049,8	1.955.165,8	99%
Keseimbangan Primer	(33.926,4)	(142.413,1)	152%	(88.238,3)	(125.579,6)	142%	(108.973,2)	(124.407,9)	114%	(87.329,5)	(11.490,9)	13%
Pembiayaan Anggaran	245.894,7	323.108,0	131%	273.179,0	334.503,4	122%	330.167,8	366.623,8	111%	325.936,7	305.692,6	94%
Surplus/Defisit	(245.894,7)	(298.422,8)	121%	(273.178,9)	(308.340,9)	113%	(330.767,8)	(340.975,9)	103%	(325.936,6)	(263.442,9)	83%

	2019		Realisasi	2020		Realisasi
	APBN	LKPP		APBN	LKPP	
Pendapatan Negara	2.165.111,8	1.960.633,6	91%	1.699.948,5	1.647.783,3	97%
Penerimaan Perpajakan	1.786.378,7	1.546.141,9	87%	1.404.507,5	1.285.136,3	92%
Penerimaan Bukan Pajak	378.297,9	408.994,3	108%	294.141,0	343.814,2	117%
Hibah	435,3	5.497,3	1263%	1.300,0	18.832,8	1449%
Belanja Negara	2.461.112,0	2.309.287,3	94%	2.739.165,8	2.595.481,1	95%
Belanja Pemerintah Pusat	1.634.339,5	1.496.313,9	92%	1.975.240,2	1.832.950,9	93%
Transfer Ke Daerah dan Da	826.772,5	812.973,4	98%	763.925,6	762.530,2	100%
Utang Bunga	275.885,3	275.521,2	100%	338.784,3	314.088,1	93%
Belanja diluar Utang	2.185.226,7	2.033.766,1	93%	2.400.381,5	2.281.393,0	95%
Keseimbangan Primer	(20.114,9)	(73.132,6)	364%	(700.433,1)	(633.609,7)	90%
Pembiayaan Anggaran	296.000,2	402.051,5	136%	1.039.217,4	1.193.293,8	115%
Surplus/Defisit	(296.000,2)	(348.653,7)	118%	(1.039.217,4)	(947.697,8)	91%

Keterangan

- Realisasi Belum Maksimal
- Realisasi Maksimal